



Pemprov Anggarkan Rp 42 M, Pemkot Refocusing APBD

PEMROV DIJ telah menyiapkan anggaran Rp 42 miliar untuk program makan bergizi gratis (MBG). Namun mekanisme teknis perhitungan detail dan distribusi masih menunggu intruksi dari pusat ■



AGUNG DWI PRAKOSO/RADAR JOGJA

BENY SUHARSONO

Baca *Pemprov...* Hal 7

Sambungan dari hal 1

"Kami sudah dimandatori nantinya dua persen dari pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DIJ, pemprov wajib menyiapkan anggaran Rp 42 miliar," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Beny Suharsono saat dikonfirmasi kemarin (3/12).

Angka Rp 42 miliar itu merupakan perhitungan kasar yang masih bisa naik atau turun. Ia juga mengatakan secara proporsional akan mengikuti jumlah siswa di setiap kabupaten/kota. "Tentu di Sleman dan Kota Jogja akan lebih besar," tuturnya.

Ia juga akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mengingatkan agar mulai mempersiapkan program itu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ditunjuk sebagai pusat pos pelaksanaan program di DIJ. "Supaya memudahkan, namun mekanismenya menunggu intruksi pemerintah pusat," bebernya.

Kepala Dindikpora DIJ Didik Wardaya menambahkan, pelaksanaan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat. Itu kaitannya dengan anggaran per anak, mekanisme distribusi dan pelaksanaan belum dapat. Ia menyebut koordinasi di pusat juga cukup intens dalam pembahasan ini. "Kami belum tahu pasti anggaran per kepala berapa," ujarnya.

Pemerintah daerah belum

menyelenggarakan uji coba khususnya SMA/SMK. Namun beberapa SD sudah dilakukan uji coba oleh pihak ketiga. Ia berharap program tersebut bisa menanggulangi permasalahan stunting.

Sementara itu, Pemkot Jogja dipastikan melakukan refocusing APBD 2025. Itu dampak dari menjalankan MBG, program pemerintah pusat. Hanya saja, kepala daerah setempat memastikan refocusing tidak berpengaruh terhadap anggaran program-program krusial.

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengondisian maupun persiapan untuk program MBG. Salah satunya melalui refocusing anggaran pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Jogja.

Meskipun tidak bisa menjelaskan secara rinci, Sugeng memastikan, refocusing anggaran pada tiap SKPD itu tidak mengorbankan program yang berdampak pada masyarakat luas. Artinya, meski ada alokasi anggaran untuk MBG, program yang dikorbankan hanya yang bersifat sporadis dan bukan memiliki efek jangka panjang.

"Sudah dikoordinasikan pada tiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dilakukan penghematan," ujar Sugeng saat ditemui kemarin (3/12).

Dia pun memastikan, pro-

gram-program seperti bantuan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sampah juga masih aman. Sehingga ketiga program prioritas itu kemungkinan akan tetap berjalan di 2025.

Diakui Sugeng, ketiga program prioritas itu memang harus tetap dijalankan meski ada arahan dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan program MBG bagi siswa sekolah, balita, dan ibu hamil. Sebab, berefek langsung di masyarakat jika tidak berjalan.

Dari informasi yang diterima *Radar Jogja* dari sumber di DPRD Jogja, pemkot melakukan refocusing anggaran hingga Rp 200 miliar untuk memuluskan program MBG. Sebagaimana diketahui, program ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiyat Nujanat mendorong agar pemkot bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sebab memasuki 2025, pemerintah pada tiap daerah di Indonesia akan memiliki kewajiban untuk mensukseskan MBG.

Politisi Partai Gerindra itu meminta, pemkot harus segera mulai melakukan evaluasi, identifikasi, dan intensifikasi terhadap potensi PAD di Kota Jogja. Sebab, masih ada banyak potensi PAD yang belum digali secara maksimal. (oso/inu/laz/by)